

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA

(Studi Pada Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)

SKRIPSI

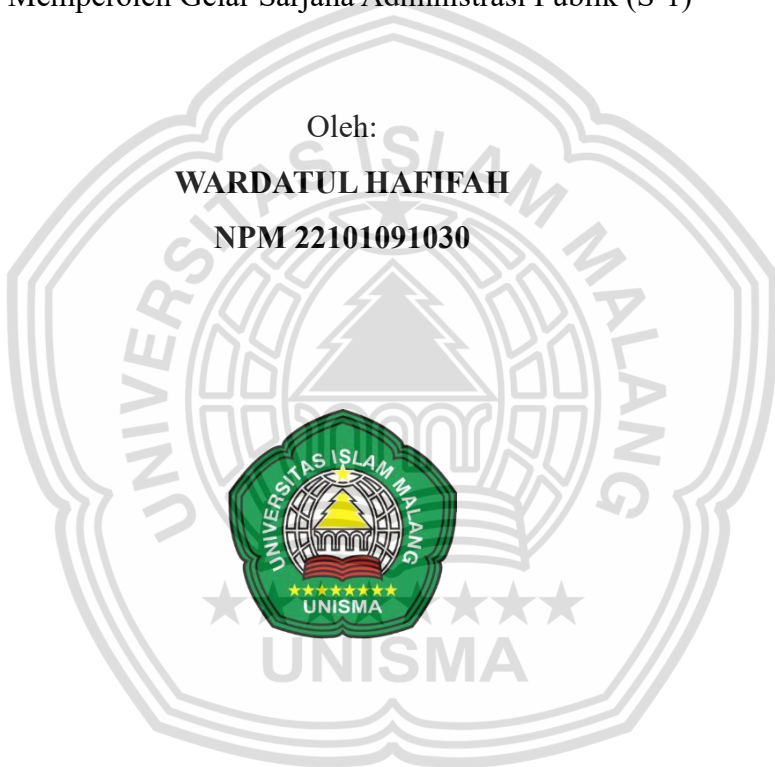
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh:

WARDATUL HAFIFAH

NPM 22101091030



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

KOTA MALANG

2025

RINGKASAN

Wardatul Hafifah, 22101091030, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, “**Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Jalan Desa (Studi Pada Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)**”, Dosen Pembimbing 1: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M, Dosen Pembimbing 2: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP.

Anggaran Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk Pembangunan infrastruktur jalan karena pada tahun 2024 Desa Selante mengalami berbagai pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang signifikan.

Metode dalam riset ini ialah penelitian kualitatif yang menjadi pendekatan penelitian yang ditujukan guna memahami fenomena sosial atau budaya melalui pengumpulan serta analisis data yang bersifat deskriptif dan naratif. Penelitian ini lebih fokus ke pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, serta pengalaman subjek penelitian daripada mengukur atau menghitung variabel-variabel tertentu. pembahasan ini akan menganalisis dan mendeskripsikan mengenai strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat Desa Selante, yang mengacu pada teori Kaplan dan Norton (2021) yang mengembangkan Balanced Scorecard, yang dapat dipergunakan guna menilai strategi pembangunan infrastruktur dengan empat indikator penting yakni perspektif: (1) keuangan, (2) pelanggan/pengguna, (3) Proses Internal, (4) Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Temuan penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwasanya pemerintah Desa Selante cukup akuntabel dalam melaksanakan Pembangunan jalan lingkungan karena menunjukkan hasil yang nyata serta dapat dirasakan masyarakat desa. Namun, Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Selante belum dikatakan efisien, keberhasilan Pembangunan jalan lingkungan di Desa Selante dapat dikatakan efektif, walaupun berdasarkan efisiensi biaya dan alokasi anggaran belum efektif, karena anggaran yang di gunakan tidak hanya dari alokasi dana desa, tetapi juga berasal dari ketua DPRD Sumbawa. Selain itu, proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan Desa Selante mencakup berbagai tahapan teknis, administratif, dan partisipatif. perencanaan dimulai dari musyawarah dusun, kemudian musyawarah Desa yang melibatkan berbagai pihak.

KATA KUNCI: Strategi, Pemerintah Desa, Infrastruktur

SUMMARY

Wardatul Hafifah, 22101091030, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025, ***“Village Government Strategy in Improving Village Road Infrastructure (Study in Selante Village, Plampang District, Sumbawa Regency)”***, Supervisor 1: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M, Supervisor 2: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP

The Village Fund Budget (ADD) is insufficient for road infrastructure development because in 2024 Selante Village experienced various significant developments and community empowerment programs.

The method in this research is qualitative research which is a research approach aimed at understanding social or cultural phenomena through the collection and analysis of descriptive and narrative data. This research focuses more on an in-depth understanding of the context, meaning, and experiences of the research subjects rather than measuring or calculating certain variables. This discussion will analyze and describe the village government's strategy in optimizing road infrastructure development to improve the welfare of the Selante Village community, which refers to the theory of Kaplan and Norton (2021) who developed the Balanced Scorecard, which can be used to assess infrastructure development strategies with four important indicators, namely perspectives: (1) financial, (2) customer/user, (3) Internal Process, (4) Learning and Growth.

The results of the research conducted by the author show that the Selante Village government is quite accountable in implementing the construction of environmental roads because it shows real results and can be felt by the village community. However, the Selante Village Village Fund Budget (ADD) has not been said to be efficient, the success of environmental road construction in Selante Village can be said to be effective, although based on cost efficiency and budget allocation it has not been effective, because the budget used is not only from the village fund allocation, but also comes from the chairman of the Sumbawa DPRD. In addition, the planning process for the construction of environmental road infrastructure in Selante Village includes various technical, administrative, and participatory stages. planning starts from hamlet deliberations, then village deliberations involving various parties.

KEYWORDS: *Strategy, Village Government, Infrastructure*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia ialah UU No. 6 Tahun 2014, yang ditujukan guna menyampaikan wewenang yang lebih luas ke pemerintah desa, memperkuat kedudukan desa dalam pemerintahan nasional, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. UU ini mengatur terkait struktur dan kewenangan desa, berisikan kepala desa (kades) serta badan permusyawaratan desa (BPD). Kades bertugas sebagai pemimpin pemerintahan desa, sementara BPD berfungsi untuk mewakili masyarakat dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 7 Ayat (1) Menyebutkan bahwa desa berhak untuk mendapatkan prioritas penggunaan dana desa atas pembangunan yang dapat mencakup infrastruktur, salah satunya adalah jalan desa. Desa diberi kewenangan lebih besar dalam mengelola potensi dan sumber daya desa. Desa dapat menyusun peraturan desa, mengelola keuangan desa, serta merencanakan dan menjalankan pembangunan desa selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mekanisme pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN, serta dana yang bersumber dari sumber lainnya. Keuangan desa dikelola transparan serta akuntabel untuk mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. UU ini juga menekankan krusialnya partisipasi masyarakat pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa diharapkan aktif dalam

menyusun rencana pembangunan, baik melalui musyawarah desa maupun program yang ada. Pemerintah pusat serta daerah memberi dukungan berupa fasilitas, pembinaan, serta pendampingan ke pemerintah desa untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kapasitas aparat desa.

UU No. 2 Tahun 2022 adalah perubahan kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 mengenai Jalan. UU ini mengatur mengenai berbagai aspek terkait jalan, termasuk jalan khusus, data dan informasi penyelenggaraan jalan. Menurut Pasal 1 Ayat 1, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi semua komponen jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapan lalu lintas, yang berada di atas tanah, di bawah tanah, dan/atau di dalam air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan truk, dan jalan kabel.

Desa ialah sebuah wilayah administratif terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang biasanya terdiri dari kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dengan batasan yang jelas. Desa memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikelola pemerintah desa serta dipimpin seorang kades. Soerjono Soekanto (2002) menyatakan bahwasanya desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni penduduk yang memiliki kehidupan sosial yang khas, dan umumnya terletak di luar kota dengan sistem pemerintahan yang sederhana. Sudirman (2009) berpendapat bahwa desa ialah unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang mempunyai kemampuan mengatur kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya, serta memiliki keunikan dalam budaya dan adat istiadat.

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur jalan desa karena penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan perkembangan desa secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur jalan desa penting untuk meningkatkan aksesibilitas Masyarakat, mendukung Pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong pengembangan potensi wisata, meningkatkan keamanan dan Kesehatan, dan meningkatkan kualitas pemerintahan. Infrastruktur jalan desa yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah bagi warga desa untuk melakukan kesehariannya, seperti pergi ke pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Selain itu, hal ini memudahkan barang dan jasa untuk berpindah tempat, yang dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Berdasarkan peraturan Bupati Sumbawa No. 9 tahun 2020 mengenai Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumbawa. Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwasanya kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 5 huruf (k) menyebutkan kewenangan berskala desa adalah termasuk pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Amartya Sen (1999) mengembangkan pandangan bahwa infrastruktur jalan harus dibangun dengan prinsip keadilan sosial. Artinya, pembangunan jalan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi

juga mencakup kelompok marginal yang selama ini mungkin terabaikan, seperti daerah terpencil dan masyarakat miskin.

Pembangunan desa ditujukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan desa melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, seperti ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Masyarakat desa wajib terlibat aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan. Partisipasi ini dapat mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pembangunan desa harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik itu dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan, sehingga hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pembangunan desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas serta keterampilan masyarakat pada pengelolaan sumber daya yang ada.

Pembangunan desa harus dilaksanakan dengan pendekatan yang mendekatkan keputusan-keputusan penting kepada masyarakat, yaitu melalui desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dan desa. Pembangunan desa harus mengedepankan keadilan sosial, yakni distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan yang adil serta merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu, artinya seluruh sektor (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll.) saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik. Penerapan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan karakteristik desa sangat penting dalam menaikkan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat desa.

Pemerintah desa perlu memiliki strategi pada pembangunan desa agar rencana yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Strategi pembangunan desa dapat membantu mencapai tujuan pembangunan desa.

Strategi di KBBI didefinisikan sebagai rencana yang cermat terkait aktivitas guna mencapai sasaran khusus. Tananah (2016) mendefinisikan strategi sebagai serangkaian pilihan yang dibuat untuk menetapkan arah, tujuan, dan cara suatu organisasi untuk mencapainya. Strategi melibatkan pemilihan langkah yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan menghadapi tantangan.

Dari beberapa penjelasan tersebut di simpulkan bahwasanya strategi ialah serangkaian rencana atau pendekatan sistematis yang di rancang guna memenuhi tujuan pembangunan jalan secara efektif dan efisien.

Desa Selante ialah satu dari 11 desa yang berada di Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, NTB. Desa Selante terdiri dari 4 dusun, 4 RW, dan 14 RT. Sejumlah sektor ekonomi terdapat di wilayah ini, termasuk pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan sangat penting bagi masyarakat untuk menopang kegiatan ekonominya.

Strategi pemerintah Desa Selante atas mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan telah dirancang secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan infrastruktur jalan. Anggaran yang dipergunakan pemerintah desa untuk melaksanakan Pembangunan infrastruktur jalan desa adalah

Anggaran Dana Desa (ADD). Namun ADD tidak mencukupi untuk Pembangunan infrastruktur jalan karena pada tahun 2024 Desa Selante mengalami berbagai pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang signifikan.

Di sisi lain, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa selante Adalah mencari pokir-pokir (pokok pikiran) untuk mncukupi dana desa tersebut. Bentuk dukungan oleh ketua DPRD Sumbawa yaitu Bapak Abdul Rafiq terkait Pembangunan jalan lingkungan yang dilaksanakan pada tahun 2024 cukup signifikan. Tidak hanya bentuk pengawasan tetapi Bapak Abdul Rafiq juga telah menyalurkan dana aspirasi senilai Rp 51.000.000.00 untuk Pembangunan jalan lingkungan di Desa Selante.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan oleh pemerintah desa adalah pembangunan infrastruktur jalan di desa Selante tidak menjadi prioritas karena adanya program lain dari pemerintah daerah atau pusat yang harus di prioritaskan, sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur jalan di desa Selante. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan merupakan tahapan-tahapan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur jalan lingkungan. Namun, di Desa Selante, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan. Selain itu belum adanya aturan resmi dari desa yang dapat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan Desa Selante.

Oleh karena itu, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pendekatan pemerintah desa Selante terhadap

pembangunan infrastruktur jalan, yang merupakan tanggung jawabnya. Peningkatan infrastruktur jalan ini ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memfasilitasi berbagai kegiatan. Maka itu peneliti tertarik menjalankan penelitian lapangan dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan yang di jelaskan di latar belakang, maka di tarik rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana strategi pemerintah Desa Selante dalam meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan?
2. Apa faktor pendukung yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Selante?
3. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Selante?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ialah tujuan penelitian berlandaskan rumusan permasalahan di atas, yakni:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi pemerintah Desa Selante dalam meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung yang memengaruhi dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan di Desa selante

3. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang memengaruhi dalam pelaksanaan Pembangunan infrastruktur jalan di Desa selante

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dimaksudkan pada studi ini yakni:

1. Manfaat teoritis

Temuan studi ini dimaksudkan dapat membantu pengembangan teori dan analisis untuk penelitian mendatang. Temuan ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan di masa mendatang terkait strategi pemerintah desa atas memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan guna menaikkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Selain menjadi syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, studi ini dimaksudkan dapat memberi wawasan serta pemahaman baru bagi penulis.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Dimaksudkan dapat menjadi rujukan atau referensi terhadap studi selanjutnya yang membahas tentang strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

- c. Bagi pemerintah desa

Dimaksudkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah Desa Selante dalam menyusun strategi terkait

pembangunan infrastruktur jalan guna untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa studi ini akan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang strategi pemerintah Desa Selante dalam membangun infrastruktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perspektif keuangan terkait strategi pemerintah Desa Selante dalam mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur jalan cukup baik jika di lihat dari akuntabilitas pemerintah Desa Selante karena Pembangunan jalan lingkungan menunjukkan hasil yang nyata serta dapat dirasakan masyarakat desa. Namun, Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Selante belum dikatakan efisien, keberhasilan Pembangunan jalan lingkungan di Desa Selante dapat dikatakan efektif, walaupun berdasarkan efisiensi biaya dan alokasi anggaran belum efektif, karena anggaran yang di gunakan tidak hanya dari alokasi dana desa, tetapi juga berasal dari ketua DPRD Sumbawa.

aksesibilitas jalan lingkungan di Desa Selante sudah cukup layak dan nyaman di gunakan oleh Masyarakat, oleh karena itu akses Masyarakat cukup efisien dalam menunjang mobilisasi. Hal ini dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat karena mempermudah akses Masyarakat ke tempat2 umum. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di Desa Selante memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal aksesibilitas, kualitas, maupun kenyamanan.

proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan Desa Selante mencakup berbagai tahapan teknis, administratif, dan partisipatif untuk memastikan pembangunan jalan desa berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan Masyarakat. perencanaan dimulai dari musyawarah dusun,

kemudian musyawarah Desa yang melibatkan berbagai pihak. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan Desa Selante telah melalui berbagai tahapan. proses pelaksanaan Pembangunan belum efisien karena partisipasi Masyarakat masih kurang.

proses perencanaan Pembangunan jalan lingkungan tidak hanya melibatkan pemerintah desa, tetapi juga melibatkan Masyarakat, proses perencanaan Pembangunan jalan lingkungan dilakukan dari musdus lalu musdes. Proses musyawarah melibatkan Masyarakat, DPD, dan pemerintah Desa Selante.

Factor pendukung yang mempengaruhi proses Pembangunan jalan di Desa Selante adalah Bentuk dukungan DPRD Sumbawa adalah memberikan dana aspirasi untuk pembangunan jalan lingkungan di Desa Selante. tujuan dari ketua DPRD Sumbawa adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan lingkungan, BPD melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan guna memastikan bahwasanya proyek berjalan sesuai dengan rencana. BPD juga melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan agar digunakan secara efektif dan efisien.

Faktor utama penghambat proses pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di Desa Selante salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Alokasi dana desa di fokuskan ke berbagai program pemerintah desa, oleh karena itu dana untuk Pembangunan jalan lingkungan belum di alokasikan secara maksimal dikarenakan beberapa fokus utama yang menjadi prioritas pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, partisipasi masyarakat mencakup beberapa

tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Namun pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat Desa Selante masih rendah.

B. Saran

Berlandaskan temuan penelitian dan data pada pembahasan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat mengatasi kendala dalam mengenai strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa selante diantaranya yakni:

- 1) Bagi pemerintah Desa Selante khususnya kepala Desa Selante, kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:
 - a. pemerintah desa perlu membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait dana aspirasi agar ada bukti administratif dan hukum atas penerimaan dana tersebut.
 - b. Memanfaatkan bahan baku lokal untuk menekan biaya dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.
 - c. Membentuk tim pemelihara jalan berbasis masyarakat (swadaya atau insentif kecil) untuk memastikan keberlanjutan fungsi jalan.
 - d. Menyusun jadwal perawatan rutin dan pelaporan kerusakan yang melibatkan RT/RW.
 - e. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya infrastruktur jalan dalam peningkatan ekonomi desa agar muncul rasa memiliki dan menjaga hasil pembangunan bersama.

- 2) saran untuk Masyarakat Desa Selante dalam pemeliharaan jalan lingkungan yang dapat dilakukan agar kondisi jalan tetap baik dan aman digunakan:
 - a. Jadwalkan kerja bakti rutin (misalnya setiap bulan) untuk membersihkan saluran air di sisi jalan, menutup lubang kecil, dan membersihkan sampah.
 - b. Untuk lubang kecil, masyarakat bisa melakukan tambal sulam menggunakan material sederhana seperti batu dan semen sebelum dilakukan perbaikan permanen oleh pemerintah desa.
 - c. Pastikan saluran air (drainase) di sekitar jalan tidak tersumbat agar air tidak menggenang dan merusak badan jalan.
 - d. Jika ada bagian jalan yang rusak parah, pasang rambu peringatan sementara agar pengguna jalan berhati-hati.
- 3) Bagi peneliti di masa mendatang diharapkan dapat meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah desa dalam proses Pembangunan jalan lingkungan. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya akan membahas lebih dalam mengenai peran kepala desa dalam menjalankan kebijakan pemerintah desa terkait pemerataan Pembangunan jalan lingkungan dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Aizah, L. (2020). *Infrastruktur dan pembangunan wilayah*. Jakarta: Penerbit Cerdas Bangsa.
- Budi, A. (2020). *Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman Sudjatmiko (2014). *Gerakan Desa Membangun: Dari Desa ke Negara*. Jakarta: Gramedia.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. MIT Press.
- Daryanto. (2014). *Pengantar Ilmu Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Drucker, Peter F. (1967) *The Effective Executive*. New York: Harper & Row
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Hadi, sutrisno. 1986. *metodologi research*. yogyakarta: andi offset
- Husein Umar. (2001). *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, hlm. 30.
- Lili, M. (2018). *Dana Desa: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Harvard Business Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. (2014). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim, E. (2005). *Pembangunan Berkelanjutan: Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian, S. P. (2005). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihaloho, M. (2015). *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

- Soeharto, D., & Hidayat, T. (2018). *Manajemen Pembangunan Infrastruktur: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Soetomo, S. (2009). *Urbanisasi dan Permasalahan Sosial Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudirman. (2009). *Pemerintahan Desa: Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supangkat, T. (2007). *Manajemen Strategik*. Gresik: Salemba Empat
- Suparlan. (2008). *Pengantar Ilmu Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutaryo. (2010). *Manajemen Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tananah, A. (2016). *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Van Horne, J. C. (2002). *Financial management and policy* (12th ed.). Prentice Hall.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. The Free Press.

Sumber Jurnal:

- Laela, E, S. Sunariyanto, Hirshi A. (2024). Strategi pengembangan kelompok tani dalam mengatasi penurunan hasil pertanian buah apel. *Jurnal respon publik*, 18(1), 41-48.
- Pratama, A. (2018). Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(3), 112-123.
- Ismatullah, Gerry Katon Mahendra. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance*. 3 (1)
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). *Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy*. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.

Peraturan Dan Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa. Jakarta: Kemendagri.

Sumber Website / Artikel Berita:

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sumbawakab.bps.go.id/&ved=2ahUKEwjUILLribSKAxVCzigGHex3DAEQFnoECDQQAQ&usg=AOvVaw1x6To52vX-nPzBSYMyumTR>

